

**ANALISIS PENGARUH PENGALIHAN PROGRAM BANTUAN
LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) KEPADA
PROGRAM SIMPANAN KELUARGA SEJAHTERA
(PSKS) TERHADAP PERILAKU PRODUKTIF MASYARAKAT
MISKIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus: Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka)**

Oon Konaah¹ dan Aan Nurhasanah²

ABSTRACT

The diversion of program from BLSM to PSKS is the Indonesian government effort for get rid of poverty that giving to poor society as compensation of the rising of fuel price effect. The diversion of program can expect to give a positive effect towards productive behavior of poor society. The goals of research are to (1) analyze the magnitude of PSKS effect to productive behavior of poor society (2) analyze the diversion of program in Islamic economic perspective (3) analyze the correct policy to cope the problems. The method use of research is descriptive of quantitative that use Artificial Neuron Network (ANN) analysis. The results of research showed that YT value of knowledge variable was 0,96 (96%) that means the effect of program felt poor society was so high, YT value of skill variable was 0,90 (90%) that means the effect of program felt poor society was medium, and YT value of attitude variable was 0,83 (83%) that means the effect of program felt poor society was low. In Islamic economic perspective, the diversion of program was not consistent with Islamic economic system because the cash transfer program can reduce the productive mental society. The strategic policy to cope the problems is adopting Baitul Maal systems. There are research for the right society, define of the productive business or lead and motive the society to open and expand the business that suitable with the capability, counsel and attend the society, more professionally on monitoring, controlling and observation the implementation of PSKS and evaluate in periodic.

Keywords: BLSM, Islamic Economic Perspective, Poverty, PSKS

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia yang telah terjadi sejak tahun 1991 hingga sekarang menjadi salah satu penyebab bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia. Terjadinya kenaikan harga BBM mengakibatkan daya beli masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan hidup menurun drastis sehingga banyak dari masyarakat Indonesia hidup dalam kekurangan. Hal tersebut dijadikan dasar bagi pemerintah untuk membuat program penanggulangan kemiskinan di Indonesia sebagai tujuan utama pembangunan nasional dan prioritas kebijakan pemerintah.

Berdasarkan sesuai Instruksi Presiden No. 7 tahun 2014, pemerintah mengeluarkan kebijakan program kompensasi atas kenaikan harga BBM yaitu Program

¹ Dosen STEI Al-Ishlah Cirebon

² Alumni STEI Al-Ishlah Cirebon

Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Pemerintah menganggap bahwa dengan sistem simpanan, pemerintah dapat dengan mudah mengidentifikasi RTS, pola penggunaan dana serta dipastikan penerima adalah orang yang dimaksud bukan orang lain. Pola penggunaan dana dalam bentuk simpanan ini diharapkan dapat mendidik masyarakat miskin lebih produktif dimana sistem simpanan merupakan bentuk kegiatan produktif, sistem simpanan sebagai bagian dari strategi nasional keuangan inklusif, perbaikan dari program BLSM yang hanya membagikan uang tunai, dapat memberikan rasa aman dan nyaman karena dana yang diterima tersimpan dalam rekening, dapat mengurangi sistem antrian karena pencairannya dapat dilakukan kapan saja.

Meskipun PSKS ini dalam bentuk simpanan dimana kegiatan simpanan ini adalah kegiatan produktif namun dalam kenyataannya tidak dapat meningkatkan perilaku produktif masyarakat miskin. Hal tersebut disebabkan oleh sosialisasi pemerintah terhadap program tidak disampaikan secara baik sehingga seluruh masyarakat miskin selalu menarik seluruh dana pada saat pencairan tanpa menyisakan dana dalam simpanan. Sebagaimana pendapat Susanto (1984: 115) yang menyatakan bahwa hambatan utama untuk mengangkat kemiskinan adalah sikap masyarakat yang terlalu fokus pada masa pendek dari pada masa jangka panjang, sehingga diperlukan bantuan dari pemerintah terutama pada masalah jangka pendek yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan pemikiran dan pemahaman yang lebih luas bagi masyarakat mengenai makna kemiskinan dan perilaku produktif itu sendiri. Islam memandang bahwa pemerintah sebagai *khalifah* dalam suatu negara berkewajiban untuk selalu memperhatikan kesejahteraan warganya, terutama warga miskin setiap saat, baik ketika harga BBM naik maupun tidak.

1.1. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat pemahaman, keterampilan dan sikap masyarakat miskin terhadap pengalihan program BLSM ke PSKS?
2. Bagaimana kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pengalihan program BLSM kepada PSKS?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam mengenai pengalihan program BLSM kepada PSKS terhadap perilaku produktif masyarakat miskin?

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis besarnya pemahaman, keterampilan dan sikap masyarakat miskin terhadap pengalihan program BLSM ke PSKS.
2. Menganalisis kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan dalam pengalihan program BLSM ke PSKS.
3. Menganalisis tinjauan ekonomi Islam mengenai pengaruh pengalihan program BLSM ke PSKS terhadap perilaku produktif masyarakat miskin.

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya yang diperoleh melalui hasil penelitian di lapangan dengan cara wawancara kepada RTS dan kepala Desa di Kecamatan Leuwimunding.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait yang dipublikasikan secara resmi yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti data penduduk miskin di Kecamatan Leuwimunding, data penduduk miskin penerima dana bantuan PSKS di Kecamatan Leuwimunding, data kependudukan dan profil Kecamatan Leuwimunding, dan lain-lain.

2.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel *independen* dan variabel *dependen*. Menurut Kurniawan (2009: 26), variabel *independen* (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang sifatnya berdiri sendiri yang biasa disimbolkan dengan X. Sedangkan variabel *dependen* (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi oleh beberapa variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri yang biasa disimbolkan dengan Y.

2.2.1 Variabel *Independen* (X)

Variabel *independen* dalam penelitian ini adalah pengalihan program BLSM kepada PSKS. Pengalihan program BLSM kepada PSKS didefinisikan sebagai pengukuran terhadap sejauhmana pengetahuan (pemahaman), keterampilan dan sikap dari RTS terhadap program tersebut.

2.2.2 Variabel *Dependen* (Y)

Variabel *dependen* dalam penelitian ini adalah perilaku produktif RTS. Perilaku produktif RTS didefinisikan sebagai pengukuran terhadap sejauhmana keberhasilan PSKS dalam mempengaruhi perilaku produktif RTS setelah mendapatkan program tersebut.

2.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di 14 desa di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka yang mendapatkan dana bantuan PSKS. Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai Maret 2016.

2.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Artificial Neuron Network* (ANN). Model ANN ini mengikuti Turban *et al.* dalam Sarkaniputra (2009) yang secara matematis fungsi transformasi ini dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \sum W_i X_i \quad \text{atau} \quad Y = X_1.W_1 + X_2.W_2 + X_3.W_3$$

Di mana Y = Jumlah *output* ; X_1, X_2, X_3 = *Input* ; dan W_1, W_2, W_3 = Bobot (*weight*). Untuk kemudian fungsi Y tersebut di transformasikan dengan rumus :

$$Y^T = \frac{1}{1 + e^{-Y}}$$

Di mana Y^T = *Output* setelah pembobotan; Y = Jumlah output

Fungsi transformasi tersebut digunakan untuk menganalisis suatu proses yang menggambarkan keterkaitan antara input, proses dan *output*. Input diproses dengan memberikan pembobotan pada setiap input. Hasil dari pembobotan tersebut disebut dengan *output*. Jumlah *output* tersebut kemudian ditransformasikan dimana hasil dari transformasi itu dijadikan sebagai hasil akhir dari seluruh proses yang dilakukan

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan PSKS di Kecamatan Leuwimunding

Hasil wawancara dengan instansi terkait diketahui bahwa dalam pelaksanaan PSKS di Kecamatan Leuwimunding terdapat beberapa permasalahan, diantaranya :

- a. Sosialisasi program kepada RTS tidak rinci : Menurut data di lapangan, sosialisasi pengalihan program BLSM kepada PSKS telah dilakukan oleh pemerintah pusat kepada RTS namun tidak disampaikan secara baik dan rinci. Akibatnya, kebanyakan dari RTS memanfaatkan dana PSKS untuk kegiatan konsumtif bukan untuk kegiatan produktif. Masyarakat yang tidak memahami PSKS tidak lantas aktif bertanya kepada pemerintah desa mengenai PSKS yang mengakibatkan program tidak dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Data RTS tidak tepat sasaran
- b. Berdasarkan penelitian di lapangan ditemukan bahwa disebabkan data yang digunakan sudah tidak relevan mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial yang tinggi diantara masyarakat miskin yang tidak terdata BPS dan masyarakat miskin yang terdata oleh BPS, terlebih pada masyarakat yang dinilai sudah berkecukupan namun tetap mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bahkan tidak sedikit masyarakat miskin yang keadaannya memprihatinkan akan tetapi tidak mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan silaturahmi baik antar masyarakat miskin maupun antara masyarakat miskin dan pemerintah desa menjadi kurang baik.
- c. Jadwal pencairan dana PSKS masih kurang efektif Dalam penelitian ini, diketahui bahwa kondisi pencairan dana PSKS di Kecamatan Leuwimunding sudah dapat terkendali dengan baik karena diatur langsung oleh pemerintah pusat melalui Pos. Hanya saja jika dilihat dari segi penjadwalan pencairan PSKS masih mengalami penumpukan antrian. Hal tersebut disebabkan pembagian jadwal yang belum efektif. Jumlah dana yang diterima kurang sesuai dengan yang seharusnya : Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dana yang diterima pada saat jadwal pencairan di Pos telah sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima oleh RTS. Hanya saja, beberapa pemerintah desa di Kecamatan Leuwimunding mengambil kebijakan untuk memotong sebagian dana yang diterima RTS yang kemudian dana yang terkumpul dibagikan kepada RTS yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak terdata oleh pemerintah. Kebijakan tersebut diambil agar dapat mengurangi tingkat kecemburuan sosial antar RTS setelah sebelumnya dimusyawarahkan oleh RT/RW setempat dan RTS itu sendiri. Adapun besaran dana yang dipotong sesuai dengan kesepakatan RTS. Namun akibat adanya pemotongan tersebut membuat RTS semakin terhimpit untuk menutupi segala kebutuhan hidup dan RTS tidak dapat meningkatkan keterampilannya dalam memproduksi. Bagi sebagian besar pemerintah desa membuat kebijakan dengan memberi pengarahan dan

pengertian kepada setiap RTS agar mau berbagi dengan RTS yang tidak mendapatkan bantuan. Selain langkah tersebut tidak menyalahi aturan juga dapat membangun rasa kepedulian antar masyarakat miskin agar saling tolong menolong tanpa merugikan satu sama lain. Bahkan ada juga beberapa pemerintah desa yang hanya memberi pengertian kepada RTS yang tidak terdata saja agar dapat memahami akan kinerja pemerintah pusat dalam menggunakan data RTS. Aspirasi masyarakat terhadap pembangunan desa berkurang. Berdasarkan penelitian di lapangan diketahui bahwa ketidakpahaman masyarakat miskin yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah terhadap proses pendataan mengakibatkan masyarakat tidak seutuhnya percaya pada pemerintahan desa dan menganggap pemerintah desa tidak adil dalam mengolah data masyarakat miskin. Masyarakat miskin yang tidak terdata enggan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa dan menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat miskin yang mendapat bantuan saja.

- d. Berdasarkan penelitian di lapangan, diketahui bahwa sebagian besar pemerintah desa di Kecamatan Leuwimunding setuju dengan adanya program bantuan PSKS karena pemerintah pusat dapat membantu masyarakat miskin dalam mengurangi beban hidup sedangkan pemerintah desa sendiri belum memiliki kemampuan untuk memberi bantuan berupa dana kepada masyarakat. Namun ada sebagian pemerintah desa yang tidak setuju dengan program bantuan PSKS karena program bantuan yang bersifat pemberian uang tunai secara cuma-cuma mengakibatkan RTS terbuai akan bantuan dan selalu berharap akan adanya bantuan dari pemerintah. Hal tersebut jelas menurunkan mental masyarakat untuk berperilaku produktif bahkan masyarakat selalu ingin dianggap sebagai masyarakat miskin agar selalu mendapatkan bantuan dari pemerintah.

3.2 Analissi ANN Terhadap Perilaku Produktif Masyarakat Miskin (RTS-PSKS)

Untuk mengukur respon RTS-PSKS mengenai tingkat pengaruh pengalihan BLSM kepada PSKS terhadap perilaku produktif RTS-PSKS, dalam penelitian ini digunakan analisis *Artificial Neuron Network* (ANN), seperti disajikan Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Hasil Perhitungan Analisis *Artificial Neuron Network* (ANN)

Keterangan	Unsur	Skor	Bobot	Y	Y ^T
Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)	1	1	0,1	0,1	
	2	4	0,5	2,0	
	3	3	0,4	1,1	
ΣY				3,2	0,96
Keterampilan (<i>Skill</i>)	1	1	0,2	0,2	
	2	1	0,2	0,2	
	3	3	0,6	1,8	
ΣY				2,2	0,90
Sikap (<i>Attitude</i>)	1	1	0,3	0,3	
	2	2	0,5	1,0	
	3	1	0,3	0,3	
ΣY				1,6	0,83

Sumber : Data primer diolah (2016)

Berdasarkan Tabel 3.1 menunjukkan bahwa nilai Y^T untuk variabel pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) RTS-PSKS sebagai berikut:

a. Variabel pengetahuan (*knowledge*)

Nilai Y^T untuk variabel pengetahuan (*knowledge*) RTS-PSKS sebesar 0,96 (96%). Nilai tersebut menjelaskan bahwa setelah ada PSKS, pengetahuan dan pemahaman RTS terhadap program, pentingnya berproduksi dan pemanfaatan dana program yang sesuai dengan arahan instansi pemerintah sangat tinggi. Jika hasil nilai pengetahuan RTS dihubungkan dengan tingkat pendidikan RTS yang mayoritas SD maka hal tersebut sangat tidak signifikan. Kemungkinan terjadi ketidaksesuaian tersebut diakibatkan oleh insting RTS yang cenderung memberikan jawaban yang positif. RTS tidak mengetahui dan memahami akan program secara mendetail dan hanya memahami program sebagai suatu program untuk membantu perekonomian jangka pendek RTS seperti untuk membiayai konsumsi sehari-hari dan biaya hutang. Meskipun begitu pemahaman sebagian RTS terhadap pentingnya produktif sangat tinggi. Sehingga dalam pemanfaatan dana PSKS, sebagian RTS mengalokasikan dana untuk pendidikan anak-anaknya dan dijadikan tambahan modal untuk usaha.

b. Variabel keterampilan (*skill*)

Nilai Y^T untuk variabel keterampilan (*skill*) RTS-PSKS sebesar 0,90 (90%). Nilai tersebut menjelaskan bahwa setelah ada PSKS, keterampilan RTS untuk memanfaatkan dana program dalam kegiatan produksi atau usaha, menyimpan sebagian dana dalam tabungan atau rekening dan tidak digunakan untuk kegiatan konsumsi termasuk sedang. Jika hasil nilai keterampilan RTS dihubungkan dengan tingkat pekerjaan RTS yang mayoritas buruh harian lepas maka hal tersebut cukup signifikan. Dimana keterampilan yang dimiliki RTS yang cenderung digunakan pada bidang fisik bukan pada pengembangan inovasi dalam berkreasi. Sedangkan RTS yang memiliki keterampilan dalam berproduksi tidak dapat mengembangkan keterampilannya dalam berproduksi, karena dana yang diterima tidak dapat mencukupi untuk meningkatkan usahanya sehingga sangat mustahil bagi RTS untuk dapat bersaing dengan masyarakat lain yang lebih berkembang.

c. Variabel sikap (*attitude*)

Nilai Y^T untuk variabel sikap (*attitude*) RTS-PSKS sebesar 0,83 (83%). Nilai tersebut menggambarkan bahwa setelah ada PSKS, keinginan RTS untuk tidak menarik seluruh dana dalam rekening, mengalokasikan dana dalam kegiatan produksi dan keinginan untuk mengajak masyarakat lain untuk lebih produktif termasuk rendah. Jika hasil nilai sikap RTS dihubungkan dengan tingkat pendapatan RTS yang mayoritas masih di bawah standar UMR Kabupaten Majalengka maka hal tersebut cukup signifikan. Ketika waktu pencairan dana tiba, RTS cenderung menarik seluruh dana karena kebutuhan hidup yang mendorong RTS tidak dapat menyisihkan sebagian dana dalam rekening dan cenderung habis pakai. Kemiskinan telah mengakibatkan RTS fokus pada kepentingan dan kesibukan masing-masing, dimana RTS yang bekerja sibuk dengan pekerjaannya dan RTS yang berwirausaha sibuk dengan usahanya masing-masing. Rendahnya kesadaran RTS untuk berinovasi dan berkreasi bersama membuat RTS sulit untuk keluar dari kemiskinan.

Dari hasil ANN diketahui bahwa pengalihan program BLSM kepada PSKS memberikan pengaruh yang signifikan pada pengetahuan dan pemahaman RTS akan pentingnya berperilaku produktif namun tidak memberikan pengaruh pada keterampilan dan sikap RTS dalam meningkatkan produktivitas RTS.

3.3. Kebijakan Strategis Pelaksanaan PSKS

Jika melihat jumlah anggaran dan realisasi anggaran PSKS yang begitu besar maka seharusnya ketiga program tersebut mampu merealisasikan tujuan utama ketiga program tersebut yakni meningkatkan produktivitas masyarakat miskin. Tabel 3.2 di bawah ini menjelaskan realisasi ketiga program tersebut:

Tabel 3.2. Realisasi BLT, BLSM dan PSKS

Program	BLT	BLSM	PSKS
Tujuan Program	a. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya b. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi c. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama	a. Melindungi keluarga miskin dari dampak langsung kenaikan BBM b. Mempertahankan kemampuan daya beli sumber energi keluarga miskin c. Menjaga stabilitas dan gejolak sosial masyarakat yang rentan terhadap pengaruh psikolog	a. Membangun keluarga produktif b. Memberdayakan dan melindungi masyarakat miskin c. Mencegah penurunan daya beli masyarakat d. Mendorong akses sistem keuangan bagi masyarakat melalui pemerataan pendapatan
Anggaran Program	Rp 37,4 triliun	Rp 9,3 triliun	Rp 15,5 triliun
Realisasi Anggaran	a. BLT 2005 Tahap I: Rp 4,47 triliun Tahap 2: Rp14,96 triliun 17,13 RTM (92,83%) b. Tahun 2008 Tahap I: Rp 5,7 triliun 18,8 juta RTS (99,02%) Tahap 2: Rp 7,5 triliun 18,7 juta RTS (98,74%)	Tahap 1: Rp 4,4 triliun 14,64 juta RTS (94,43%) Tahap 2: Rp 4,7 triliun 15,09 juta RTS (97,21%)	Tahap 1: Rp 5,8 triliun 14,46 juta RTS (93,29%) Tahap 2: Rp 8,4 triliun 13,92 juta RTS (89,81%)

Berdasarkan Tabel 3.2 terlihat bahwa tujuan dari ketiga program tersebut sudah baik dan sudah sesuai dengan ajaran Islam. Pemerintah mencoba untuk membantu masyarakat miskin agar dapat hidup dengan layak dan mendapatkan hak-haknya serta membangun rasa tanggungjawab dari masyarakat untuk selalu membangun keinginan dalam meningkatkan kualitas diri dan berkontribusi lebih terhadap lingkungan sekitar. Namun jika membandingkan anggaran dan realisasi dana untuk program kompensasi

atas kenaikan harga BBM yang begitu besar tidak berbanding lurus dengan realisasi perubahan RTS di lapangan bahkan ketika program bantuan tunai telah dialihkan dari BLT, BLSM kepada PSKS. Hal tersebut terlihat pada hasil penelitian di lapangan, dimana hasil analisis ANN dan wawancara dengan instansi terkait keseluruhannya menggambarkan bahwa program bantuan tunai PSKS juga tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan perilaku produktif RTS. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sistem ekonomi Islam, yaitu zakat. Pendistribusian zakat dapat memberikan dampak yang positif bagi RTS-PSKS sebagai *mustahiq* baik dari segi sosial maupun ekonomi karena dalam sistem Islam selain *mustahiq* dituntut untuk dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya juga dituntut untuk hidup mandiri dan layak.

Dari hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa kelemahan yang dimiliki RTS-PSKS untuk menjadi seorang *muzakki* bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya permodalan untuk usaha melainkan lebih pada mental dan kesiapan RTS-PSKS dalam manajemen usaha. Hal tersebut terlihat pada tingkat keterampilan dan sikap RTS dimana kedua unsur tersebut termasuk rendah. Sifat zakat yang sarat akan pemberdayaan *mustahiq*, di dalamnya mengandung unsur pendampingan, bimbingan dan pembinaan yang baik untuk *mustahiq*. Zakat konsumtif hanya dijadikan sebagai sentuhan bagi *mustahiq* dalam jangka pendek dan zakat produktif dijadikan sebagai langkah pemberdayaan *mustahiq* dalam jangka panjang dengan cara membangun kemandirian *mustahiq*. Lambat laun namun pasti status *mustahiq* akan berubah menjadi *muzakki*. Jika semakin banyak jumlah *muzakki* maka akan semakin meningkat pula jumlah dana zakat yang akan menurunkan jumlah *mustahiq*. Sistem pengelolaan zakat seperti itu telah dilaksanakan oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT berperan sebagai *Baitul Maal* (rumah harta) dan *Baitul Tamwil* (rumah usaha).

Baitul Maal merupakan bidang sosial (nirlaba) yang berdampak pada profit dan berfungsi dalam menghimpun ziswaf atau dana lainnya yang halal, sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan bidang bisnis (*profit motive*) yang pengelolaannya harus efektif dan efisien dan berfungsi untuk memfokuskan dalam kegiatan simpan-pinjam dana. Kedua fungsi tersebut dapat menciptakan iklim yang kondusif demi terciptanya keadilan sosial dan pemerataan pembangunan ekonomi karena keberadaannya sangat dekat dengan masyarakat kecil terutama pada fungsi *Baitul Maal*. Jika pemerintah tidak dapat mengalihkan program bantuan tunai kepada sistem ekonomi Islam maka kebijakan strategis yang tepat adalah dengan mengikuti dasar pelaksanaan zakat produktif *Baitul Maal*, diantaranya:

- a. Melakukan studi kelayakan
Studi kelayakan ini dimaksudkan untuk mengetahui jenis usaha yang dibiayai sehingga dapat berkembang dan dapat mengembalikan pinjaman yang diberikan. Studi kelayakan yang diteliti adalah data calon *mustahiq*, kebutuhan pinjaman, jangka waktu kemampuan dalam pengembalian pinjaman, jumlah bagi hasil yang mampu diberikan dan kesesuaian pengalokasian pinjaman.
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
Ketika *mustahiq* belum memiliki jenis usaha yang pasti maka tugas *Baitul Maal* adalah mengarahkan dan mendorong *mustahiq* untuk membuka usaha yang layak dengan tidak memberikan unsur pemaksaan. Sedangkan ketika *mustahiq* telah memiliki usaha namun tidak berkembang dengan baik maka tugas *Baitul Maal* adalah menganalisis usaha tersebut. Jika usaha tersebut masih dapat dikembangkan maka *Baitul Maal* bertugas untuk memberikan motivasi dan memberikan langkah-langkah untuk mengembangkannya. Namun jika usahanya

- tidak dapat dikembangkan lagi maka tugas *Baitul Maal* adalah memberikan penjelasan dan meyakinkan *mustahiq* akan prospek usahanya yang tidak baik dan memberikan usaha penggantinya yang lebih baik.
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan (pendampingan)
Selain *Baitul Maal* bertugas untuk membantu *mustahiq* agar dapat mengembangkan perekonomiannya, *Baitul Maal* juga bertugas untuk menjaga dana zakat yang telah diamanahkan kepadanya. Dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan (pendampingan) kepada *mustahiq*, *Baitul Maal* dapat menjaga kedua tugas tersebut. Tanpa adanya bimbingan dan penyuluhan dari *Baitul Maal* dikhawatirkan dana zakat yang diberikan akan disalahgunakan oleh *mustahiq*. Selain itu *mustahiq* akan merasa lebih diperhatikan oleh *Baitul Maal* dan *mustahiq* semakin terarah dalam mengelola dana pinjaman tersebut.
 - d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
Meskipun *Baitul Maal* bertanggungjawab dalam pemantauan dan pengawasan terhadap pemanfaatan dana zakat namun yang paling berpengaruh adalah tingkat kesadaran *mustahiq* terhadap tugas *Baitul Maal* tersebut. Terutama tingkat kesadaran *mustahiq* dalam mengambil segala keputusan bisnis dan perilaku sosialnya. Hal tersebut dapat mendidik sikap tanggungjawab *mustahiq* dalam mengelola dan mengembalikan pinjaman (*repayment*).
 - e. Mengadakan evaluasi
Adanya evaluasi ini ditujukan untuk menghasilkan suatu data yang menggambarkan pengalokasian dana yang benar-benar tepat sasaran dan usaha yang dijalankan dapat berkembang sesuai dengan rencana. Dalam evaluasi *Baitul Maal* hanya bertugas sebagai fasilitator dan *mustahiq* melakukan evaluasi sendiri. Hal tersebut selain dapat meningkatkan kemampuan *mustahiq* dalam memahami perkembangan usaha yang dijalanannya juga dapat membuat strategi-strategi yang lebih baik untuk kedepannya.
 - f. Membuat laporan

Adanya laporan yang dibuat oleh *Baitul Maal* sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas *Baitul Maal* dalam pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Laporan tersebut ditujukan kepada pemerintah, *muzakki*, dan masyarakat luas baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang dilakukan secara berkala. Dengan begitu setiap pihak yang berkepentingan dapat melihat prospek *Baitul Maal* dalam menghimpun dan mengembangkan dana zakat secara tepat sasaran. Secara tidak langsung laporan-laporan tersebut akan semakin meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap citra *Baitul Maal* yang amanah.

3.4 Konsep Pengalihan Program Bantuan Tunai Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam, program bantuan tunai yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan adalah zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan fidyah (ziswaf). Pengelolaan ziswaf di Indonesia diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011 dimana ziswaf ini dikelola oleh dua organisasi yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Cangkupan ziswaf lebih luas dibandingkan dengan program pemerintah karena ziswaf tidak hanya diberikan pada golongan masyarakat fakir dan miskin saja melainkan diberikan pada seluruh golongan yang sangat membutuhkan bantuan pada umumnya, salah satunya zakat. Zakat yang didistribusikan kepada masyarakat terbagi dalam dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

Zakat fitrah merupakan zakat konsumtif yang hanya dihimpun pada saat bulan Ramadhan dan didistribusikan pada saat menjelang 'Idul Fitri, sedangkan zakat maal merupakan zakat harta yang dihimpun secara fleksibel dan dikeluarkan pada saat mencapai *haul* (satu tahun) dan *nisab* (kadar minimum harta dikenakan zakat). Zakat fitrah ditujukan untuk membangun kasih sayang antara *muzakki* dan *mustahiq* dengan cara memberikan kebutuhan pokok pada *mustahiq* sehingga *mustahiq* dapat merasakan kebahagiaan yang sama pada saat hari raya Idul Fitri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah, untuk mensucikan orang yang berpuasa dari segala perkataan keji dan buruk yang mereka lakukan dalam mereka berpuasa, dan menjadi makanan untuk orang yang miskin" (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Zakat maal ditujukan untuk menumbuhkan perekonomian *mustahiq* dan membangun mental *mustahiq* menjadi lebih produktif. Salah satunya dengan cara memberikan zakat produktif sehingga status *mustahiq* dapat berubah menjadi *muzakki*. Hal tersebut sesuai dengan makna zakat yaitu selain sebagai *thaharah* (kesucian) juga sebagai *nama'* (tumbuh/berkembang) yang menjadikan *mustahiq* semakin berdaya kehidupannya dan tidak selalu bergantung pada pemberian orang lain secara terus menerus. Dengan adanya zakat, Islam ingin mengarahkan seluruh umatnya untuk selalu berperilaku produktif sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an:

"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (Q.S. Al-Jumu'ah: 10)

Program bantuan tunai pemerintah PSKS memiliki kemiripan dengan zakat dimana kedua program tersebut sama-sama bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin dan membangun masyarakat yang lebih produktif. Namun jika zakat dipersamakan dengan PSKS dalam membangun masyarakat produktif, maka hal tersebut kurang sesuai karena sistem zakat sendiri memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan PSKS, diantaranya:

1. *Mustahiq*

Zakat hanya diberikan kepada 8 golongan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehingga dalam pendataan *mustahiq* zakat lebih terdentralisasi dengan baik dibandingkan pendataan dalam program pemerintah. Bahkan untuk menentukan golongan fakir dan miskin juga harus ditetapkan secara ketat melihat zakat fitrah juga diwajibkan untuk seluruh golongan. Hal tersebut dapat mempermudah dalam mengidentifikasi *mustahiq* dan meminimalisir ketidaktepatan sasaran.

2. Zakat lebih bersifat dinamis

Didasarkan pada skala prioritas dan kebutuhan sesuai dengan kondisi *mustahiq* yang sebenarnya bukan dibagi rata kepada 8 golongan sehingga dalam penganggaran dana pada zakat tidak diperlukan seperti halnya program pemerintah. Hal tersebut dapat menghindari tumpang tindih terhadap indikator keberhasilan program dalam mengentaskan kemiskinan yang sering tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

3. Profesionalisme

Profesionalisme amil dalam mendistribusikan dana zakat lebih tinggi dibandingkan program pemerintah. Kesalahan dalam pendistribusian dana zakat kepada para *mustahiq* sangat tidak dibenarkan baik dalam pandangan hukum Islam maupun hukum negara. Mengelola zakat berarti mengelola amanah bukan sebuah proyek biasa melainkan proyek akhirat. Sehingga bagi setiap amil yang menyimpang dari aturan akan mendapat sanksi hukum positif juga mendapat sanksi moral.

4. Dampak zakat

Dampak zakat terhadap mental *mustahiq* lebih positif dibandingkan dengan program pemerintah. Zakat dipandang sebagai hak yang harus diberikan pada *mustahiq* dan sebagai kewajiban bagi *muzakki* karena zakat memandang kemiskinan pada soal kekayaan bukan pada *mustahiq*. Terdapat kehormatan yang diterima oleh *mustahiq* sehingga dapat meningkatkan motivasi bagi *mustahiq* untuk dapat berdiri sejajar dengan *muzakki*. Sedangkan program pemerintah lebih terkesan memandang kemiskinan pada faktor internal masyarakat miskin dan menjadikan program sebagai sumbangan semata yang mengakibatkan mental tanggungjawab masyarakat menjadi lemah.

Dari beberapa keunggulan tersebut mencerminkan bahwa program zakat lebih baik dalam membangun mental produktif masyarakat miskin dibandingkan dengan program pemerintah.

Mental produktif yang tinggi dapat menghantarkan masyarakat miskin menjadi lebih termotivasi dalam meningkatkan kualitas diri masyarakat baik dari sikap maupun dalam mengaktualisasikan diri dalam menghadapi setiap persoalan hidup terutama dalam persoalan perekonomian.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan baik, maka penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap dari masyarakat RTS-PSKS masing-masing sebesar 0,96 (96%); 0,90 (90%) dan 0,83 (83%). Variabel sikap masyarakat RTS-PSKS lebih rendah dibandingkan dengan variabel lainnya. Hal ini menunjukkan masyarakat masih menganggap bahwa bantuan yang diberikan pemerintah untuk kepentingan konsumtif dan tidak perlu adanya keberlanjutan.
2. Pengalihan program BLSM kepada PSKS masih menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tidak jauh berbeda. Diantaranya sosialisasi program kepada RTS tidak mendetail, data RTS tidak tepat sasaran, jadwal pencairan dana PSKS masih kurang efektif, jumlah dana yang diterima kurang sesuai dengan yang seharusnya, aspirasi masyarakat terhadap pembangunan desa berkurang, dan menurunnya mental masyarakat miskin untuk berperilaku produktif.
3. Konsep pengalihan program BLSM kepada PSKS sebagai program untuk meningkatkan perilaku produktif dalam perspektif ekonomi Islam dikatakan kurang sesuai dengan sistem Islam dalam membangun mental produktif masyarakat miskin bahkan cenderung menurunkan mental produktif masyarakat

miskin. Jika membandingkan program bantuan tunai Islam, seperti zakat, jauh lebih baik dalam membangun mental produktif masyarakat miskin dibandingkan dengan program bantuan tunai milik pemerintah.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka penulis dapat memberikan beberapa saran dengan mengadaptasi sistem program *Baitul Maal* diantaranya:

1. Pemerintah pusat melakukan penelitian studi kelayakan penerima dana bantuan diantaranya data calon RTS yang dilakukan secara *update* dan mendistribusikan dana bantuan sesuai dengan kebutuhan RTS di lapangan.
2. Menetapkan jenis usaha produktif untuk RTS yang memiliki kemampuan dalam usaha namun belum memiliki jenis usaha yang pasti dengan cara mengarahkan dan mendorong RTS untuk membuka usaha yang sesuai dengan kemampuannya tanpa unsur pemaksaan bukan sekedar memberikan dana tunai. Namun jika RTS sudah memiliki jenis usaha tertentu maka pemerintah harus memberikan pengarahan kepada RTS agar usahanya maju dan berkembang. Jika RTS tidak memiliki keterampilan usaha dan tidak memiliki jenis apapun maka pemerintah harus mengalokasikan dana bantuan dalam kegiatan padat karya.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan (pendampingan) kepada RTS-PSKS agar dana yang diberikan tidak disalahgunakan oleh RTS.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSKS agar dapat mendidik sikap tanggungjawab RTS dalam mengelola dana PSKS.
5. Mengadakan evaluasi secara berkala agar dalam pendistribusian dana PSKS dapat benar-benar tepat sasaran dan usaha yang dijalankan oleh RTS dapat berkembang.
6. Membuat laporan sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan masyarakat miskin dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana PSKS.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, Albert. 2009. *Belajar Mudah SPSS untuk Pemuda*, Yogyakarta: MediaKom.
- Sarkaniputra, Murasa. 2009. *Rugyah Syar'iyah: Teori, Model, dan Sistem Ekonomi*, Jakarta: Al-Ishlah Press dan STEI.
- Susanto, Phil Astrid S. 1984. *Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: Bina Cipta.